



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan ke 3 pada RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)" dengan sasarannya yaitu "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah".

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Kami berharap agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh aparatur BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan, maupun seluruh pihak terkait.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Kepala,

BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (**outcome**) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 100);
20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 41);
25. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah juga sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

1.4. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dengan Tipe A. BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencanapembangunan Daerah;
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
- c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:

- i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- ii. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh

instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;

- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
 - j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
 - k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
 - l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.
- b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;

- j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan

- rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
- f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
 - g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada KepalaBadan;
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah;
 - j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
- Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi

penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan

- k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur.

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

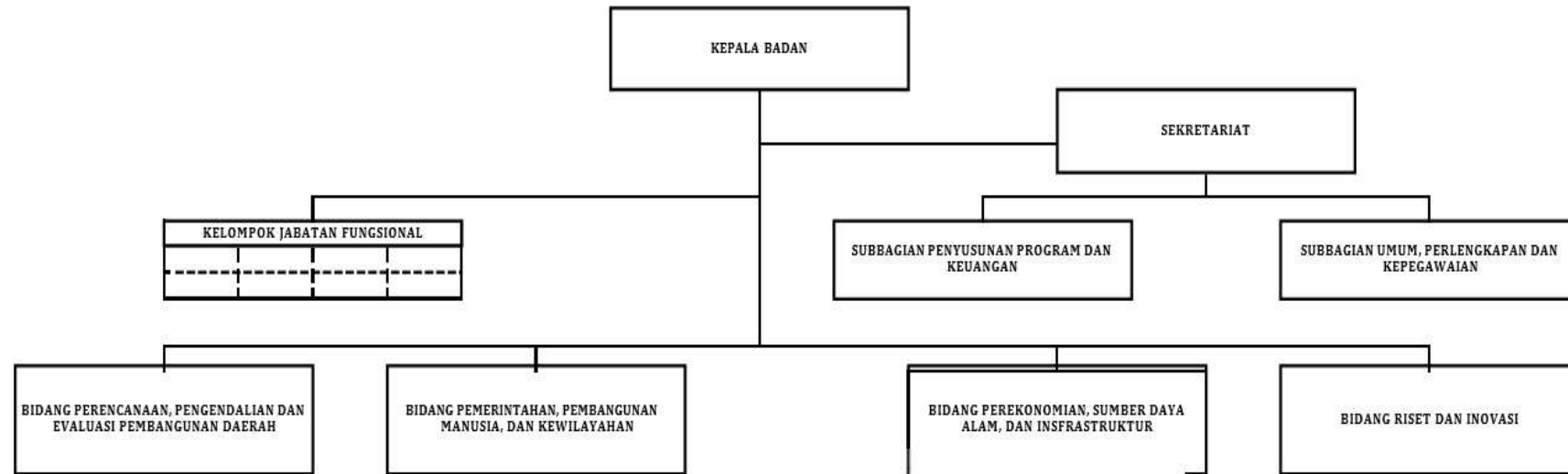
Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
- c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

- d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

- k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - 1. Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- g. Kelompok Jabatan
- 1) Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.
 - 2) Jabatan Pelaksana
Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN**



1.5. Sistematika Penulisan

Perjanjian Kinerja (PK) Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, memuat Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Bab III. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penetapan Perencanaan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BUDI PURWANTO, S.P., M.Si

Jabatan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAINUDDIN NOOR

Jabatan : Pj. Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua

Pj. Bupati Seruyan

DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama

**Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan**

BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.458.666.300,00	APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 2.348.344.700,00	APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.350.146.000,00	APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 440.000.000,00	APBD

Pihak Kedua



Pihak Pertama



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBD)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.458.666.300,00	APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.682.000,00	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.742.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.140.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.140.000,00	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.660.000,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.345.468.236,00	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.191.512.248,00	APBD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.415.988,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.540.000,00	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.510.000,00	APBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.510.000,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.380.000,00	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.920.000,00	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.537.000,00	APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105.923.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.026.276.400,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBD)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.547.000,00	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.421.400,00	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.384.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.313.000,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.900.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.650.000,00	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.805.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.256.000,00	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.858.800,00	APBD
	Pengadaan Mebel	98.484.000,00	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	372.374.800,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.570.864,00	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.202.400,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.368.464,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.920.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.680.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.870.000,00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.780.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.590.000,00	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.348.344.700,00	APBD
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.843.615.700,00	APBD
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	211.226.100,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	194.818.900,00	APBD
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	253.622.400,00	APBD
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	42.730.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.141.218.300,00	APBD
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	159.729.000,00	APBD
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	54.192.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBD)
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	105.537.000,00	APBD
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	345.000.000,00	APBD
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	151.300.000,00	APBD
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	193.700.000,00	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.350.146.000,00	APBD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	588.175.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.422.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	140.421.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.868.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	204.964.000,00	APBD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	380.734.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.863.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.150.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBD)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.135.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.068.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	96.168.000,00	APBD
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	381.237.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.792.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	113.179.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.228.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	77.538.000,00	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	440.000.000,00	APBD
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100.000.000,00	APBD
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000,00	APBD
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	80.000.000,00	APBD
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	80.000.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBD)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	80.000.000,00	APBD
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	80.000.000,00	APBD
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	180.000.000,00	APBD
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	70.000.000,00	APBD
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	30.000.000,00	APBD
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	80.000.000,00	APBD

Pihak Kedua


Pj. Bupati Seruyan

D. JAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama


**Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan**

BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEDY HIDAYAT, ST., MM

Jabatan : Plt. Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI PURWANTO, S.P., M.Si

Jabatan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan

DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina

NIP. 19800224 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%
2	Terpenuhinya Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan	100%
3	Terpenuhinya Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen
4	Terpenuhinya Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5	Terpenuhinya Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana	Persentase Pengadaan BMD terhadap RKBMD	100%
7	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
8	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di BAPPEDALITBANG	Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di BAPPEDALITBANG	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.458.666.300,00	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.682.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.345.468.236,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.510.000,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.380.000,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.026.276.400,00	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.858.800,00	APBD

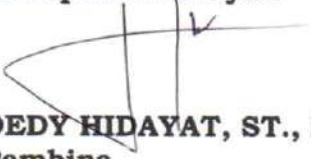
No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.570.864,00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.920.000,00	APBD

Pihak Kedua



Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan
ENDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama



Plt. Sekretaris Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan
DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI SYAIDAH, S.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI PURWANTO, S.P., M.Si

Jabatan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

SITI SYAINAH, S.Si
Pembina
NIP. 19761115 200604 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen
2	Teranalisisnya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dianalisis	5 Jenis
3	Terciptanya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RPJMD Tahun Berkenaan	138 Program
		Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Tahun Berkenaan	138 Program
		Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Tahun Berkenaan	138 Program
		Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	138 Program

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.348.344.700,00	APBD
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.843.615.700,00	APBD
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	211.226.100,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	194.818.900,00	APBD
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	253.622.400,00	APBD
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	42.730.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.141.218.300,00	APBD
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	159.729.000,00	APBD
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	54.192.000,00	APBD
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	105.537.000,00	APBD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	345.000.000,00	APBD
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	151.300.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	193.700.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan**



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah**

SITI SYAIDAH, S.Si
Pembina
NIP. 19761115 200604 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEDY HIDAYAT, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI PURWANTO, S.P., M.Si

Jabatan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan

DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang konsisten	Jumlah Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	54 Program
		Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	54 Program
		Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	54 Program
		Jumlah Program APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	54 Program
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang konsisten	Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program
		Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program
		Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program
		Jumlah Program APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	764.691.000,00	APBD
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	588.175.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.422.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	140.421.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.868.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	204.964.000,00	APBD
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	176.516.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.228.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	77.538.000,00	APBD

Pihak Kedua

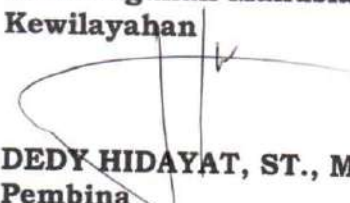
**Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan**



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan
Kewilayahan**



DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI PURWANTO, S.P., M.Si

Jabatan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perekonomian,
SDA dan Infrastruktur

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina

NIP. 19750928 199902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang konsisten	Jumlah Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tahun Berkenaan	44 Program
		Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tahun Berkenaan	44 Program
		Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tahun Berkenaan	44 Program
		Jumlah Program APBD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tahun Berkenaan	44 Program
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang konsisten	Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program
		Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program
		Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program
		Jumlah Program APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	585.455.000,00	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	380.734.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.863.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.135.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.068.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	96.168.000,00	APBD
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	204.721.000,00	APBD
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.792.000,00	APBD
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.600.000,00	APBD
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.150.000,00	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	113.179.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan**



SUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Perekonomian,
SDA dan Infrastruktur**

IWAN SUMANTRI, SP., M.A.P
Pembina
NIP. 19750928 199902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUGIAN NOOR, S.Pi

Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI PURWANTO, S.P., M.Si

Jabatan : Kepala Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah

SUGIAN NOOR, S.Pi
Pembina
NIP. 19740514 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 Dokumen
2	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen
3	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen
4	Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengembangkan Inovasi dan Teknologi	5 Perangkat Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	440.000.000,00	APBD
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100.000.000,00	APBD
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000,00	APBD
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	80.000.000,00	APBD
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	80.000.000,00	APBD
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	80.000.000,00	APBD
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	80.000.000,00	APBD
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	180.000.000,00	APBD
	Penelitian, Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	70.000.000,00	APBD
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	30.000.000,00	APBD
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	80.000.000,00	APBD

Pihak Kedua



**Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan**

BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660303 199203 1 014

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Daerah**

SUGIAN NOOR, S.Pi
Pembina
NIP. 19740514 200604 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MULYONO, A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDY HIDAYAT, ST., MM
Jabatan : Plt. Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

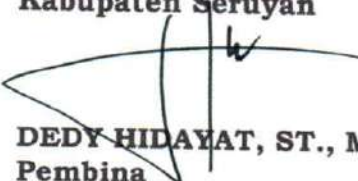
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

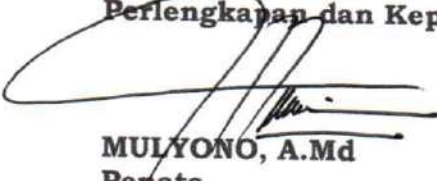
Pihak Kedua

Plt. Sekretaris Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan


DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Umum,
Perlengkapan dan Kepegawaian


MULYONO, A.Md
Penata
NIP. 19790118 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68 Paket
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket
8	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
9	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
10	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
11	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
12	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan
13	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
14	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit
15	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan
16	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan
17	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
18	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit

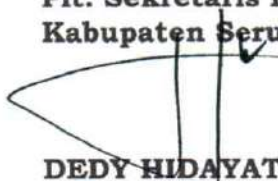
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
19	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit
20	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.038.516.064,00	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.510.000,00	APBD
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.510.000,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.380.000,00	APBD
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.920.000,00	APBD
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.537.000,00	APBD
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105.923.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.026.276.400,00	APBD
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.547.000,00	APBD
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.421.400,00	APBD
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.384.000,00	APBD
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.313.000,00	APBD
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.900.000,00	APBD
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.650.000,00	APBD
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.805.000,00	APBD
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.256.000,00	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.858.800,00	APBD
13	Pengadaan Mebel	98.484.000,00	APBD
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	372.374.800,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.570.864,00	APBD
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.202.400,00	APBD
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.368.464,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.920.000,00	APBD
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.680.000,00	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBN/APBD)
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.870.000,00	APBD
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.780.000,00	APBD
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.590.000,00	APBD

Pihak Kedua

**Plt. Sekretaris Bappedalitbang
Kabupaten Seruyan**



DEDY HIDAYAT, ST., MM
Pembina
NIP. 19800224 201001 1 005

Pihak Pertama

**Kepala Sub Bagian Umum,
Perlengkapan dan Kepegawaian**



MULYONO, A.Md
Penata
NIP. 19790118 200604 1 013

BAB III PENUTUP

Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran sampai dengan sub kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Bappedalitbang Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 melaksanakan 4 program, 18 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan. Adapun 4 program tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Semoga Perjanjian Kinerja ini dapat bermanfaat bagi Bappedalitbang Kabupaten Seruyan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada umumnya dalam memberikan informasi mengenai rencana maupun target kinerja tahunan yang akan dicapai.

Kuala Pembuang, 20 Januari 2025

Kepala,



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014